



# **PANCASILA, EKONOMI RAKYAT DAN MASA DEPAN**

**Dr. Agung Sudjatmoko, S.Pd. MM.**

Wakil Ketua Umum DEKOPIN, Entrepreneur & Dosen Binus  
Jakarta

# Sekilas Biodata



Nama	Dr. Agung Sudjatmoko, S.Pd., MM.
Organisasi	DEKOPIN Pusat/Bina Nusantara University/PT Pay.Inc
Jabatan	Wakil Ketua Umum/Dosen/Entrepreneur
Alamat kantor	DEKOPIN Jl. Raya Pasar Minggu No 97B, Pasar Minggu, Jakarta PT. Pay.Inc Gd. Kemang Bisnis Plasa, R 107, Kemang, Jakarta Selatan
Alamat rumah	Jl. Garuda II No 23, Komplek Inkoppil, Kel. Jakasampurna, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi
Kontak	HP. 0817197881 Email: <a href="mailto:agungsudjatmoko@yahoo.com">agungsudjatmoko@yahoo.com</a>
Pengalaman	UKKI/JMNH, Kopma UNS, Himsan IPS, KMA PBS, Kopindo, Dekopin, PT. Pay. Inc, IPKKI/SMK Teknosa Solo
Hobi	Organisasi dan olah raga

# Sistem Ekonomi Negara Berdasar Konstitusi

Sistem ekonomi negara-negara di dunia berbeda sesuai dengan ideologi negara

1. Sistem ekonomi kapitalis-liberalis
2. Sistem ekonomi monopolistik-komunis
3. Sistem ekonomi pancasila/konstitusi/kebersamaan /kekeluargaan/gotong royong

I  
N  
D  
O  
N  
E  
S  
I  
A

TAP MPR RI No. 16 Tahun 1999  
Politik Ekonomi Dalam Rangka  
Demokrasi Ekonomi ditetapkan  
tanggal 13 November 1998

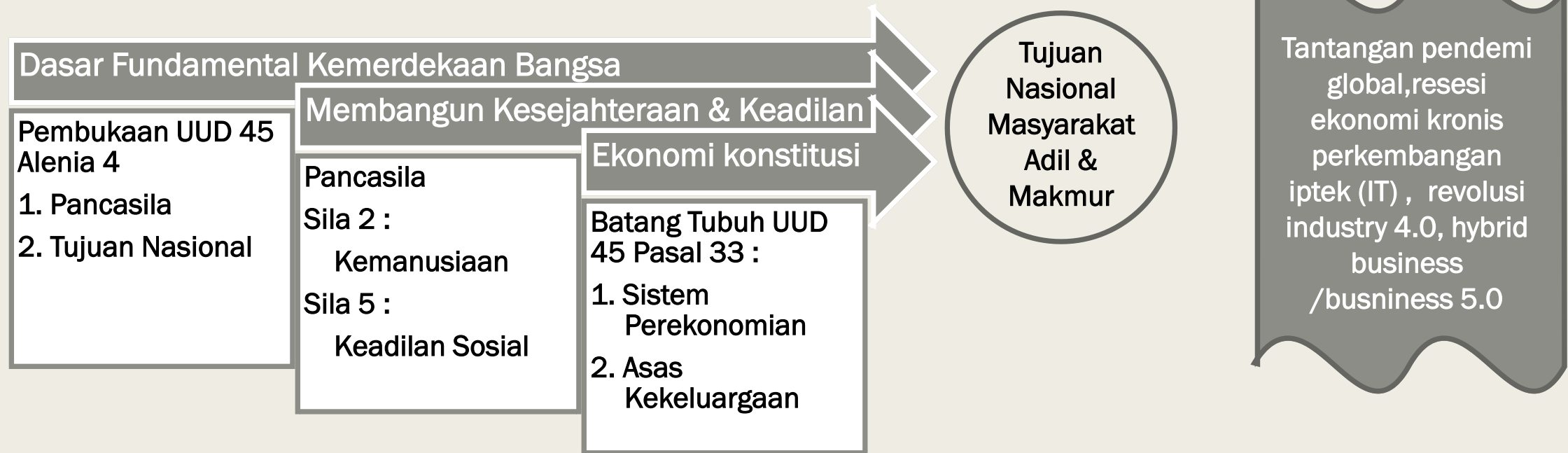
Konstitusi negara di Bab XIV tentang  
**PEREKONOMIAN NASIONAL DAN  
KESEJAHTERAAN SOSIAL**  
Pasal 33 Ayat 1, 2, 3, 4 & 5

Sistem ekonomi nasional ????

Sistem ekonomi harus  
disusun oleh negara untuk  
menjamin keadilan dan  
pemerataan. Sistem  
ekonomi tidak dibiarkan  
tersusun oleh mekanisme  
pasar yang akan  
menyebabkan ketidakadilan  
dan kesenjangan sosial.  
Sistem ekonomi Indonesia  
adalah sistem Ekonomi  
Kesejahteraan Sosial  
(Konstitusi)

Fakta masih ada  
ketimpangan  
ekonomi, social  
yang tinggi di  
negara kita =  
dilihat dari gini  
rasio (0,382)  
pada Maret  
2020

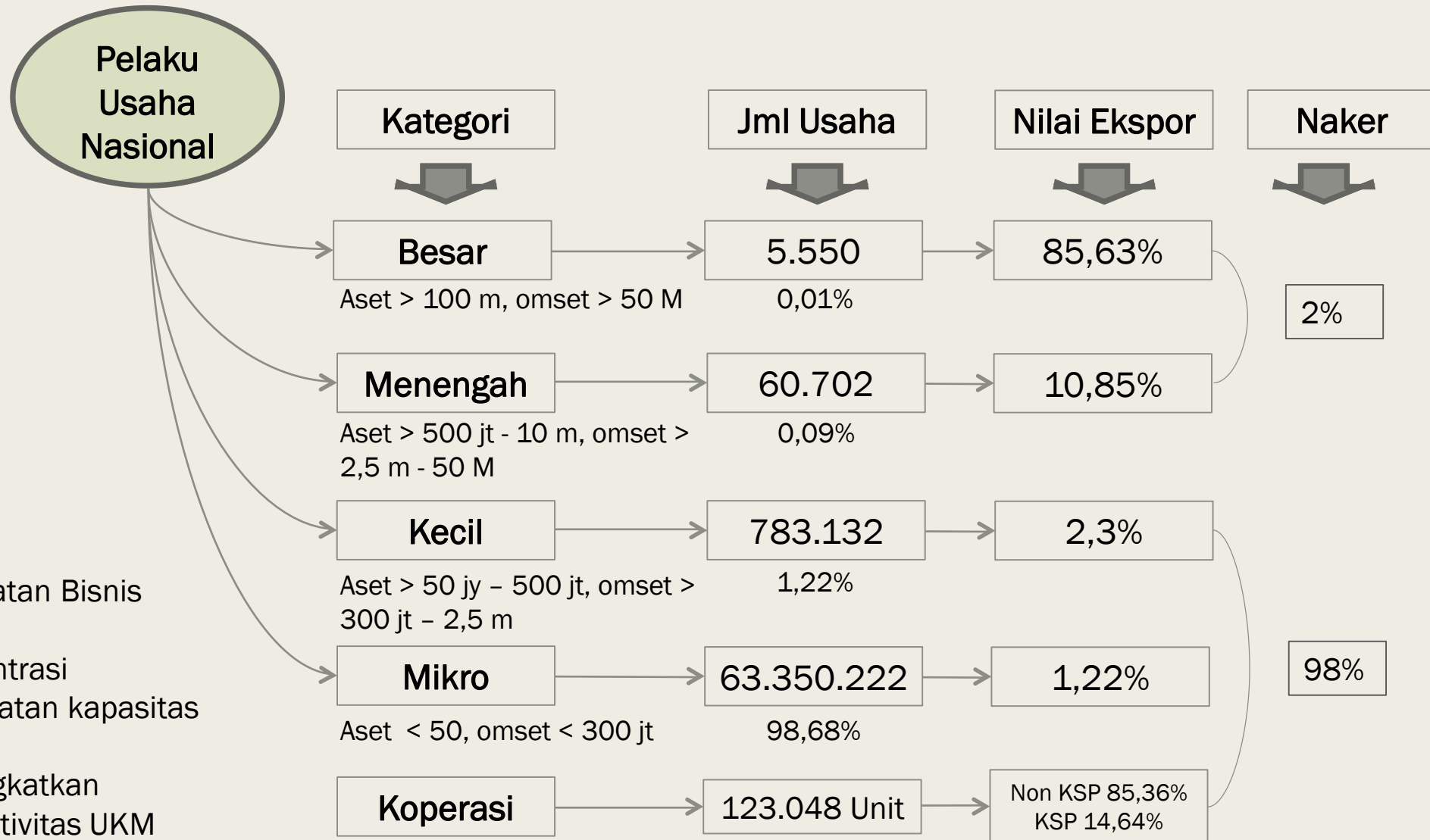
# Dasar Pemikiran : Membangun Pemerataan dan Keadilan Ekonomi Nasional



## Fakta Kondisi Ekonomi dan Proses Perwujudan Tujuan Nasional:

1. Belum memiliki sistem perekonomian nasional (saat ini belum ada UU system Ekonomi Nasional)
2. Pelaku ekonomi diletakan pada usaha negara, koperasi dan swasta
3. Kategori pelaku ekonomi didominasi usaha mikro, kecil, 98 % dengan sedikit pelaku usaha menengah dan besar (2%)
4. Fakta yang terjadi ketimpangan antar pelaku ekonomi, sektor ekonomi, pendapatan dan penguasaan sumber daya ekonomi (putaran ekonomi 80% di pulau Jawa khususnya Jakarta, terjadi ketimpangan SDM dan penguasaan teknologi antar daerah)
5. Indikator Ekonomi diletakan pada pertumbuhan ekonomi, kontribusi PDB, presentase penguasaan aset nasional, tax rasio/rasio pajak, persentase penyerapan tenaga kerja dll

# Kondisi Ekonomi dan Pelaku Ekonomi Nasional



**Fokus:**

1. Penguatan Bisnis UKM
2. Konsentrasi Peningatan kapasitas UKM
3. Meningkatkan produktivitas UKM
4. Penyerap tenaga kerja

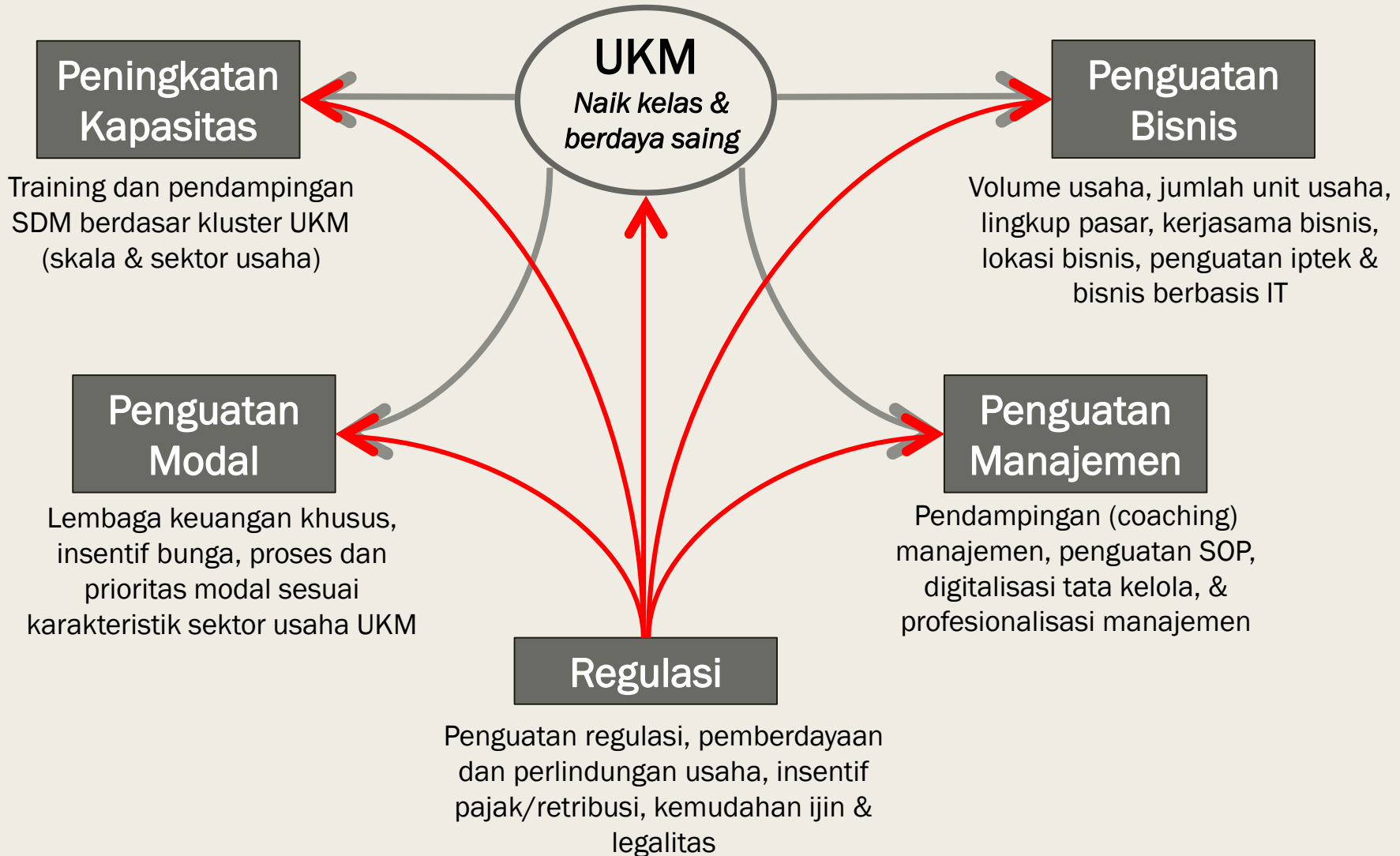
Sumber: Kementerian Koperasi UKM RI, 2019

# Kerangka Model Pendekatan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

*Pancasila = Perwujudan nilai kemanusiaan & Keadilan sosial*

**Memperkuat Ekonomi Rakyat**

*Hablum minnalloh, hablum minnas*

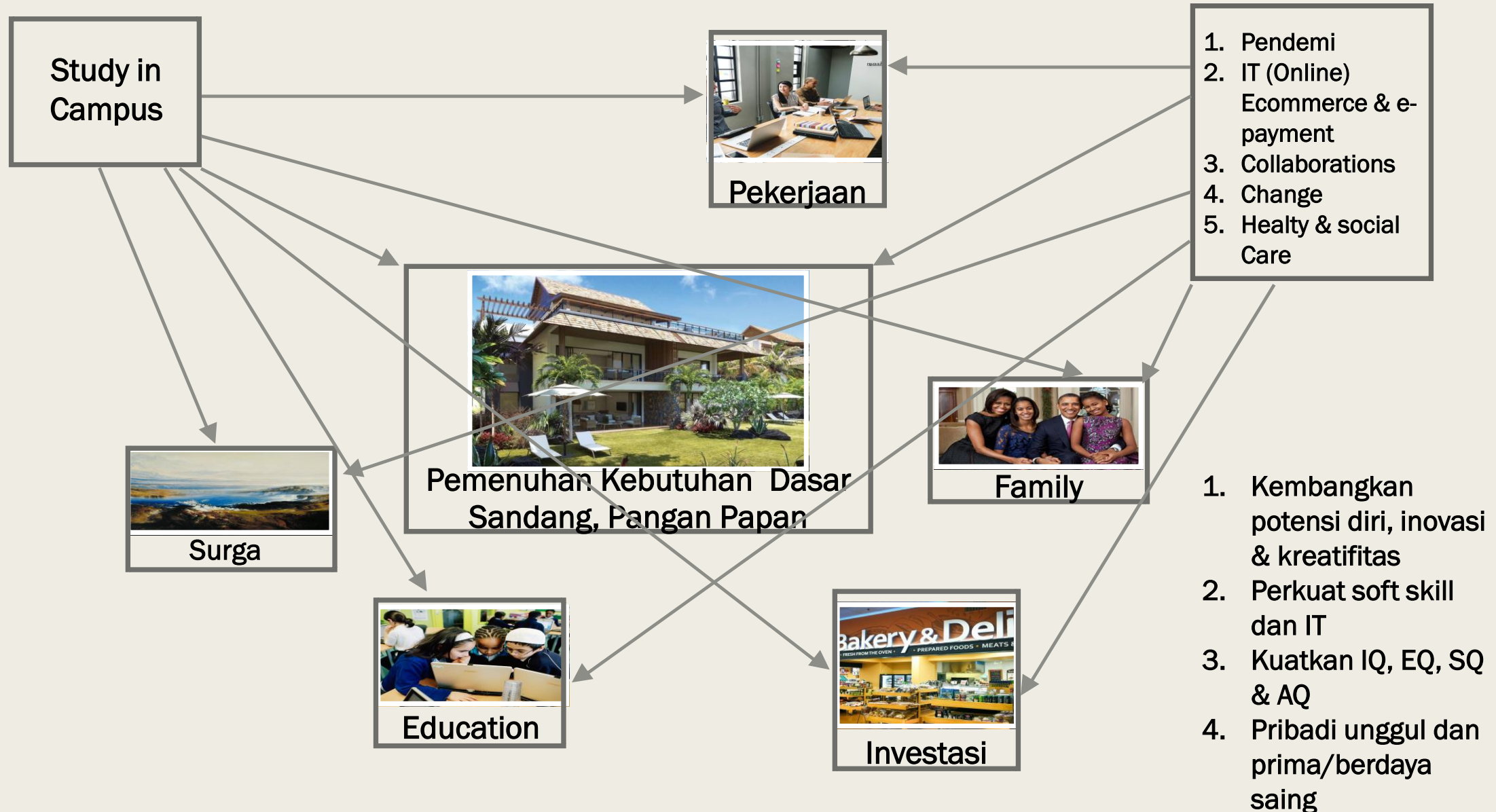


# Sikap Membangun Ekonomi Berkeadilan dan Berpihak

1. Negara harus menyusun sistem perekonomian nasional yang berkeadilan mewujudkan negara kesejahteraan (*welfare state*);
2. MPR RI harus melakukan amandemen sebagian khususnya dibidang ekonomi (Pasal 33 UUD 45) untuk menempatkan koperasi (ekonomi gotong royong) sebagai pelaku utama ekonomi nasional;
3. Penyusunan kebijakan pembangunan perekonomian harus memerankan secara adil dan proporsional pelaku usaha tanpa diskriminasi dan subordinasi antara usaha mikro, kecil menengah dan besar baik ditingkat daerah atau pusat;
4. Mengembalikan dan meletakkan dasar-dasar pembangunan pada garis-garis besar pembangunan nasional (GBHN) sebagai pedoman dan panduan pembangunan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah, sehingga tidak terjadi perubahan-perubahan prioritas dan program pembangunan nasional yang tidak menjamin kesungguhan dan konsistensi pencapaian tahapan pembangunan nasional
5. Gerakan koperasi mendesak pemerintah dan pengambil kebijakan untuk membangun basis ekonomi rakyat dibidang pangan dan sandang berdasar potensi dasar sumber daya negara untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi nasional dan meningkatkan daya saing produk nasional di kancah global.
6. Koperasi siap melakukan transformasi bisnis menuju sistem pengelolaan usaha konglomerasi, modern dan profesional dengan menggarap sektor riil strategis di bidang pangan. Hal ini membutuhkan kerja keras dari pelaku usaha koperasi dan pemerintah untuk menata ulang sistem pengalokasian sumber daya pembangunan yang berkeadilan.

Membangun ekonomi berkeadilan dan berpihak untuk pemerataan penguasaan sumber daya ekonomi pilihan bijak untuk kedaulatan ekonomi negara

# Menyiapkan Masa Depan yang Penuh Tantangan





**Terima Kasih**